

## Peran sektor basis dalam mengurangi disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah

Dinda Larasati\*; Riko Setya Wijaya

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Veteran Jawa Timur

\*E-mail korespondensi: 18011010030@student.upnjatim.ac.id

### Abstract

*This study aims to analyze the economic base sector and the role of economic base sector in reducing in income disparity between regencies/cities in Subosukawonosraten region, regional typology, and knowing the level of disparity income in the Subosukawonosraten region by using Location Quotient, Williamson Index and Klassen Typology. The results showed that The Subosukawonosraten area has 12 economic base, and the most dominant sector reduce the income disparity is transportation and warehousing sector (1.8626%); Klassen Typology showed that only 1 city are included in the quadrant category II, which is a developed but depressed area, 4 regencies/cities are included in quadrant III or regions developing fast and 2 regencies/cities are included in undeveloped areas; Williamson index in timeframe 4 years tends to increase from 0.37441743 in 2017 to 0.402990835 in 2020.*

---

**Keywords:** base sector, income disparity, location quotient, typology klassen

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor ekonomi basis dan perannya terhadap disparitas pendapatan antar kabupaten/kota, tipologi daerah, dan mengetahui besarnya disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten dengan menggunakan metode analisis Location Quotient, Indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Subosukawonosraten memiliki 12 sektor ekonomi basis, dan sektor yang paling dominan mengurangi disparitas pendapatan dimiliki sektor transportasi dan pergudangan (1.8626%); sedangkan Tipologi Klassen menunjukkan hanya 1 kota yang termasuk kedalam kategori kuadran II yakni daerah yang maju tapi tertekan, 4 kabupaten/kota masuk kedalam kuadran III atau daerah berkembang cepat dan yang tertinggal 2 kabupaten/kota; Indeks Williamson dalam jangka waktu 4 tahun cenderung meningkat dari sebesar 0,37441743 tahun 2017 menjadi 0,402990835 tahun 2020.

---

**Kata kunci:** sektor basis, ketimpangan pendapatan, location quotient, tipologi klassen

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah sebuah jembatan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Sehingga masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang cukup dan dapat memenuhi kebutuhan serta mewujudkan keinginannya. Pada dasarnya suatu bangsa maupun negara melakukan pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk mengupayakan peningkatan taraf hidup ataupun kesejahteraan rakyatnya dengan menggali, mengelola serta mengembangkan semua sumber daya yang ada dan membentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna merangsang perkembangan kegiatan ekonomi Hal ini berarti

diperlukannya model perencanaan untuk mengetahui atau mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan sektor ekonomi pada suatu daerah (Tarigan, 2016).

Akan tetapi dilihat dari kondisi geografis dan sumber daya alamnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi dan termasuk kedalam negara sedang berkembang (NSB) serta memiliki kondisi perekonomian yang berbeda-beda tiap daerah, menyebabkan pembangunan dalam skala nasional tidak selalu dilakukan secara sistematis, sejumlah daerah telah mencapai pertumbuhan yang cepat dan sementara daerah lain tumbuh lambat (Ambar et al., 2021). Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia, peran modal (investor) cenderung memilih daerah perkotaan atau daerah yang sudah memiliki infrastruktur transportasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, bank, asuransi dan fasilitas lainnya. Selain itu, perbedaan potensi dan fasilitas masing-masing daerah akan mengakibatkan industri atau kegiatan ekonomi berkumpul dan membentuk aglomerasi.

Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi agar bisa dirasakan lebih merata dilakukan kebijakan pembangunan yang memanfaatkan berbagai potensi ekonomi (sektor ekonomi basis) dan sumber daya yang berbeda-beda di setiap masing-masing daerah, serta kemampuan untuk mengidentifikasi potensi masing-masing sektor potensial dan mampu menganalisisnya untuk menjadikan sektor-sektor tersebut agar bernilai guna tinggi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Akan tetapi pada realitanya sejauh ini pembangunan hanya ditunjukkan semata-mata sekedar mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi saja, bukan peningkatan taraf hidup masyarakat. Artinya, selama ini tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pemerataan distribusi hasil pembangunannya. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi dianggap berhasil apabila suatu wilayah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan merata (Lailatul & Lucky, 2021). Islami dan Nugroho (2018) menyebutkan bahwa dalam pembangunan ekonomi terdapat *trade-off* antara tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan yang kurang merata antar daerah. Karena itu, atensi pemerintah wajib tertuju pada seluruh wilayah tanpa terdapat perlakuan spesial pada wilayah tertentu saja.

Pemerintah mengesahkan Undang – Undang No 32 tahun 2004 yang berisi pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri yang berarti terdapat pembagian tanggung jawab yang harus dijalankan agar terciptanya kemandirian secara ekonomi dalam mengelola potensi ekonomi yang ada sehingga memungkinkan tercapainya pembangunan ekonomi daerah yang merata. Pelimpahan kewenangan ini lebih dikenal dengan desentralisasi yang berimplikasi munculnya daerah-daerah otonom. Munculnya otonomi daerah khususnya di kabupaten/kota maka pembangunan di daerah diharapkan menjadi lebih optimal dengan mendorong setiap kabupaten/kota untuk melakukan kerjasama regional dalam rangka meningkatkan daya saingnya di perekonomian global.

Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk kawasan kerjasama antar daerah agar terwujudnya pemerataan pembangunan serta peningkatan perekonomian antar daerah termasuk pengurangan ketimpangan pendapatan antar daerah, hal ini telah diatur didalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional. Terdapat 8 kawasan kerjasama antar kabupaten/kota yang terbentuk di Provinsi Jawa Tengah, yakni salah satunya Kawasan Subosukawonosraten.

Kawasan Subosukawonosraten ialah salah satu kawasan kerjasama yang terdiri dari Kabupaten/Kota terletak di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, pada masa kolonial Belanda kawasan ini adalah wilayah Eks Karesidenan Surakarta yang menjadi wilayah administratif. Pusat dari kegiatan ekonomi Subosukawonosraten yakni Kota Surakarta, kota terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Tujuan dibentuknya kawasan Subosukawonosraten adalah untuk melakukan regionalisasi dengan menekankan kemandirian kabupaten/kota sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tarik tersendiri sebagai wilayah yang mempunyai potensi untuk kegiatan perdagangan, investasi maupun wisata. Kawasan Subosukawonosraten yang diharapkan menjadi daerah yang mandiri ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan ekonomi, termasuk persoalan ketimpangan/disparitas pendapatan antar kabupaten/kota yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari PDRB perkapita antar kabupaten/kota di kawasan Subosukawonosraten pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1** PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Kawasan Subosukawonosraten tahun 2017-2020

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	Rata-rata PDRB Perkapita
Kota					
Surakarta	61393833.00	64697318.14	68213523.43	66672263.02	65244234.40
Kab. Boyolali	20777022.12	21847612.55	23031007.91	21077673.37	21683328.99
Kab. Sukoharjo	27509853.43	28879265.25	30357748.30	29327149.90	29018504.22
Kab. Karanganyar	27228156.22	28609836.36	30051455.61	28051406.36	28485213.64
Kab. Wonogiri	20778145.31	21790909.26	20778145.31	19710557.27	20764439.29
Kab. Sragen	27089155.28	28558141.29	30154425.99	26989338.51	28197765.27
Kab. Klaten	21409184.39	22503331.39	23669651.80	21803079.78	22346311.84

*Sumber: BPS Kabupaten/Kota Kawasan Subosukaownosraten 2021*

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten/kota yang memiliki PDRB perkapita tertinggi di Kawasan Subosukawonosraten yaitu Kota Surakarta dengan rata-rata PDRB perkapita sebesar 65244234.40 pada tahun 2017-2020 sedangkan Kabupaten Wonogiri memiliki PDRB perkapita terendah di kawasan Subosukawonosraten dengan rata-rata PDRB perkapita sebesar 20764439.29. Perbedaan PDRB perkapita antar kabupaten/kota di wilayah ini merupakan indikator adanya ketidakmerataan yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan antar wilayah kabupaten/kota dalam kawasan Subosukawonosraten. Disparitas pendapatan antar wilayah ini merupakan sebuah fenomena yang krusial dalam pembangunan ekonomi yang harus dicari seberapa besarnya dan diketahui penyelesaiannya agar tidak menimbulkan permasalahan atau konflik yang menyebabkan angka kriminalitas meningkat, apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten. Kemudian menentukan sektor ekonomi mana saja yang menjadi basis di Kawasan Subosukawonosraten, didapatkan tipologi kelas masing-masing kabupaten/kota di Kawasan Subosukawonosraten, serta mengidentifikasi peran

masing-masing sektor basis terhadap disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten.

## METODE

### Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series*, yakni berupa data PDRB Kabupaten/Kota di kawasan Subosukawonosraten atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha selama periode 2017-2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi data-data yang telah di publikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Kawasan Subosukawonosraten dan BPS Provinsi Jawa Tengah serta menggunakan literatur-literatur lain seperti buku serta jurnal yang berkaitan guna menjadi penunjang untuk pemenuhan penelitian ini.

### Metode analisis

#### Location quotient (LQ)

Metode analisis Location Quotient digunakan untuk mengetahui potensi suatu sektor basis dalam suatu wilayah tertentu, dengan memberikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor i di wilayah tersebut dibandingkan dengan kemampuan sektor i yang sama di wilayah yang lebih luas atau satu tingkat lebih tinggi. Pada analisis LQ dapat mengetahui sektor apa saja yang mampu mendorong perekonomian di wilayah tersebut, sedangkan sektor ekonomi non basis adalah sektor ekonomi lainnya yang hanya menjadi penyokong dari sektor basis. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt} \dots\dots\dots 1$$

Diketahui :

Vi = Nilai PDRB sektor i pada tingkat daerah yang lebih rendah

Yi = Nilai PDRB sektor i pada tingkat daerah yang lebih tinggi

Vt = Nilai total PDRB pada tingkat daerah yang lebih rendah

Yt = Nilai total PDRB pada tingkat daerah yang lebih tinggi

Kriteria pengukuran Location Quotient menurut Bendavid Val dalam Apriyani (2017), apabila besaran  $LQ > 1$  maka sektor i dapat dikatakan sektor basis, yang berarti tingkat spesialisasi kabupaten/kota lebih tinggi dari tingkat provinsi serta sektor tersebut mampu memenuhi pasar daerah itu sendiri maupun luar daerah. Sedangkan,  $LQ = 1$  maka tingkat spesialisasi kabupaten/kota sama dengan tingkat provinsi dan sektor tersebut hanya mampu melayani daerahnya sendiri. Apabila besaran  $LQ < 1$  maka dikatakan sektor i termasuk sektor non basis yang berarti tingkat spesialisasi kabupaten/kota lebih rendah dari tingkat provinsi sehingga sektor i kurang mampu melayani permintaan pasar didaerahnya sendiri

### Indeks williamson

Menurut Sjafrizal dalam Rido Purba (2020) Indeks Williamson adalah analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional berdasarkan produk domestik bruto (PDRB) perkapita dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Indeks Williamson dapat dihitung dengan formula (Denny Iswanto, 2015:50):

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_i (Y_i - Y)^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{Y} \dots\dots\dots 1$$

Keterangan :

- CV<sub>w</sub> = Indeks disparitas pendapatan wilayah
- Y<sub>i</sub> = Besaran pendapatan perkapita pada Kabupaten/Kota i
- Y = Besaran rata-rata pendapatan perkapita Provinsi
- f<sub>i</sub> = Jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota I
- n = Jumlah penduduk pada Provinsi

Ukuran tingkat besaran disparitas pendapatan perkapita disimpulkan kedalam kriteria sebagai berikut: 1).Nilai IW < 0,3 maka tingkat disparitas pendapatan pada wilayah tersebut tergolong rendah, 2).Nilai IW antara 0,35 – 0,5 maka tingkat disparitas pendapatan pada wilayah tersebut tergolong sedang, 3).Nilai IW 0,5 maka tingkat disparitas pendapatan pada wilayah tersebut tergolong tinggi

**Tipologi klassen**

Pendekatan tipologi klassen dapat diukur dengan dua indikator utama yakni, laju pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita daerah tersebut, tipologi klassen digunakan untuk mengetahui bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dengan membandingkan kabupaten/kota dengan wilayah satu tingkat lebih tinggi seperti provinsi (Hana Octavia, 2021). Sjafrizal (2014:197) membagi wilayah menjadi 4 klasifikasi, yakni

**Tabel 2.** Klasifikasi tipologi klassen

	<b>Y<sub>i</sub> &gt; Y</b>	<b>Y<sub>i</sub> &lt; Y</b>
<b>R<sub>i</sub> &gt; R</b>	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh Kuadran I	Daerah berkembang cepat Kuadran III
<b>R<sub>i</sub> &lt; R</b>	Daerah maju tapi tertekan Kuadran II	Daerah relatif tertinggal Kuadran IV

Sumber: Sjafrizal, 2008.

Dimana :

- Y<sub>i</sub>: Tingkat PDRB perkapita atas dasar harga konstan di Kabupaten/Kota i
- Y: Tingkat PDRB perkapita atas dasar harga konstan di Provinsi i
- R<sub>i</sub>: Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota i
- R: Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi
- Kuadran I: Sektor maju dan tumbuh pesat
- Kuadran II: Sektor maju tapi tertekan
- Kuadran III: Sektor potensial
- Kuadran IV: Sektor relatif tertinggal

**Peranan sektor basis dalam mengurangi disparitas pendapatan di kawasan Subosukawonosraten**

Untuk mengetahui bagaimana peranan sektor ekonomi basis di Kawasan Subosukawonosraten dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara indeks ketimpangan dengan memasukkan PDRB sektor basis dengan indeks ketimpangan tanpa memasukkan PDRB sektor basis. Besarnya selisih antara indeks ketimpangan

dengan memasukkan dan tanpa memasukkan PDRB sektor basis tersebut, menunjukkan seberapa besar dan bagaimana peranan sektor basis terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota (Apriyani, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis sektor basis di Kawasan Subosukawonosraten (location quotient)

Dalam mengidentifikasi sektor basis dan nonbasis perekonomian suatu wilayah, dapat menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Analisis LQ pada penelitian ini menggunakan pendekatan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan membandingkan besarnya peranan suatu sektor di Kawasan Subosukawonosraten terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Apabila besaran nilai  $LQ > 1$  maka peranan suatu sektor di kawasan Subosukawonosraten lebih dominan dibandingkan dengan sektor tersebut di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari analisis Location Quotient dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

**Tabel 3** Hasil Perhitungan Analisis LQ Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2017-2020

Sektor	Tahun				Rata-rata LQ	
	2017	2018	2019	2020		
1	0,92	0,97	0,97	0,96	0,95	Non basis
2	0,71	0,76	0,75	0,75	0,74	Non basis
3	0,78	0,84	0,85	0,86	0,83	Non basis
4	1,28	1,36	1,34	1,31	1,32	Basis
5	1,10	1,15	1,16	1,15	1,14	Basis
6	0,93	0,98	0,99	0,98	0,97	Non basis
7	1,18	1,24	1,23	1,22	1,22	Basis
8	1,02	1,08	1,05	0,98	1,04	Basis
9	1,06	1,12	1,10	1,09	1,09	Basis
10	1,05	1,11	1,10	1,13	1,10	Basis
11	1,07	1,15	1,15	1,14	1,13	Basis
12	1,04	1,09	1,08	1,07	1,07	Basis
13	1,14	1,20	1,20	1,20	1,19	Basis
14	1,03	1,09	1,08	1,07	1,07	Basis
15	1,18	1,24	1,22	1,21	1,21	Basis
16	1,06	1,12	1,12	1,13	1,11	Basis
17	0,89	0,94	0,94	0,95	0,93	Non basis

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan analisis Location Quotient di kawasan Subosukawonosraten menurut PDRB ADHK selama periode 2017-2020, menurut sektor lapangan usaha, terdapat 12 sektor yang mempunyai nilai  $LQ > 1$ , yakni sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,32 , sektor pengadaan air dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,14 , sektor perdagangan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,22 , sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,04 , sektor penyedia akomodasi makan dan minum dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,09 , sektor informasi dan komunikasi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,10 , sektor jasa keuangan dan asuransi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,13 , sektor real estate dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,07 , jasa perusahaan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,19 , sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan nilai rata-rata LQ

sebesar 1,07 , sektor jasa pendidikan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,21 dan yang terakhir sektor jasa kesehatan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,11. Hal ini berarti, ke duabelas sektor tersebut memiliki peran yang besar dalam pembangunan perekonomian di kawasan Subosukawonosraten. Selain duabelas sektor basis diatas, sisanya adalah sektor non basis dengan nilai rata-rata LQ<1 yakni sebanyak 5 sektor.

**Disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten (Indeks Williamson)**

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesenjangan atau disparitas pendapatan di kawasan Subosukawonosraten dapat dilihat melalui hasil perhitungan Indeks Williamson yang disajikan pada tabel 3 berikut:

**Tabel 4** Indeks Williamson di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2017-2020

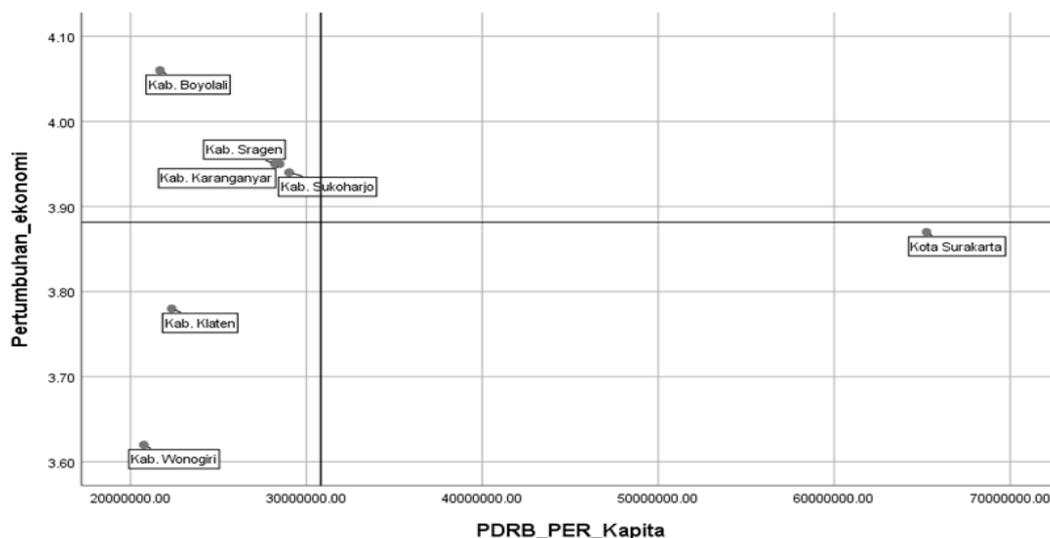
Tahun	Indeks Williamson
2017	0,37441743
2018	0,375457131
2019	0,381381848
2020	0,402990835
Rata-rata	0,383561811

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis Indeks Williamson tabel diatas, angka disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten tergolong sedang dimana dari tahun 2017 hingga 2020 selalu berada di angka antara 0,35-0,5 dengan rata-rata nilai Indeks Williamson sebesar 0,383561811. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat Kawasan Subosukawonosraten tergolong sedang (moderat) akan tetapi dari tahun ke tahunnya disparitas yang terjadi cenderung selalu meningkat dari 0,37441743 pada tahun 2017 hingga pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,402990835.

**Tipologi Klassen**

Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Kawasan Subosukawonosraten dianalisis menggunakan tipologi klassen berdasarkan pada indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Hasil analisis tipologi klassen Kawasan Subosukawonosraten dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1** Tipologi Klassen Kawasan Subosukawonosraten tahun 2017-2020

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Gambar 1 diketahui bahwa dari keseluruhan Kabupaten/kota yang berada di dalam Kawasan Subosukawonosraten yang masuk kedalam daerah relatif tertinggal atau Kuadran IV adalah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten. Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo masuk kedalam Kuadran III yakni daerah berkembang cepat sedangkan untuk Kota Surakarta masuk kedalam Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan. Untuk kuadran I yaitu daerah maju dan tumbuh pesat tidak ada Kabupaten/kota yang masuk kedalam klasifikasi.

### **Identifikasi peranan sektor basis dalam mengurangi disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten**

Sektor ekonomi basis adalah sektor yang paling mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah dan berkontribusi dalam pembentukan PDRB. Karena adanya trade-off antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan disparitas pendapatan antar daerah, maka penelitian ini menguraikan hasil dari peranan PDRB di seluruh sektor ekonomi basis terhadap disparitas pendapatan di dalam Kawasan Subosukawonosraten.

Terdapat duabelas sektor ekonomi basis yang ada di Kawasan Subosukawonosraten yang terdiri dari sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, sektor perdagangan, transportasi pergudangan, penyedia akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Identifikasi peranan sektor basis tersebut terhadap disparitas pendapatan dihitung berdasarkan selisih perbandingan antara indeks disparitas pendapatan perkapita dengan memasukkan PDRB sektor basis dengan indeks disparitas tanpa memasukkan PDRB sektor basis.

**Tabel 5** Indeks Williamson sektor basis pengadaan listrik dan gas

<b>Tahun</b>	<b>CVw Kawasan Subosukawonosraten</b>	<b>Cvw Tanpa Sektor Basis Pengelolaan Listrik Dan Gas</b>	<b>Persentase Perubahan(%)</b>
2017	0.37441743	0.373912074	0.1350
2018	0.375457131	0.374959926	0.1324
2019	0.381381848	0.380882835	0.1308
2020	0.402990835	0.402478324	0.1272

*Sumber: Data diolah, 2022*

Perbedaan tingkat disparits dengan dan tanpa sektor basis pengadaan listrik dan gas sangat jelas terlihat. Indeks Williamson dengan sektor basis justru menyebabkan disparitas pendapatan perkapita di kawasan Subosukawonosraten meningkat, dengan rata-rata pertahunnya mencapai 0,383561811 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanpa memasukkan sektor basis pengadaan listrik dan gas dengan rata-rata sebesar 0,38305829. Persentase perubahan dengan dan tanpa sektor basis pengadaan listrik dan gas dari tahun ketahunnya hanya mengalami perubahan yang sedikit yakni hanya sebesar 0.1314%. Meskipun hanya mengalami perubahan yang sedikit, akan tetapi sektor basis pengadaan listrik dan gas dapat menyebabkan meningkatnya disparitas pendapatan di kawasan Subosukawonosraten.

**Tabel 6** Indeks Williamson sektor basis pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur

<b>Tahun</b>	<b>CVw Kawasan Subosukawonosraten</b>	<b>Cvw Tanpa Sektor Basis pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang</b>	<b>Persentase Perubahan(%)</b>
2017	0.37441743	0.373926139	0.1312%
2018	0.375457131	0.354559213	5.5660%
2019	0.381381848	0.380902605	0.1257%
2020	0.402990835	0.402486998	0.1250%

*Sumber: Data diolah, 2022*

Perbedaan tingkat disparitas pendapatan keduanya cukup membuktikan bahwa sektor basis pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang justru berkontribusi terhadap peningkatan disparitas pendapatan di kawasan Subosukawonosraten. Nilai indeks Williamson tanpa sektor basis pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan rata-rata sebesar 0.377968739 lebih rendah dibandingkan dengan memasukkan sektor basis pengadaan yakni dengan rata-rata 0.383561811. Rata-rata persentase perubahan dengan dan tanpa sektor basis pengadaan air sebesar 1.4870% semakin mengakibatkan disparitas pendapatan di kawasan subosukawonosraten tahun 2017-2020.

**Tabel 7** Indeks Williamson (CVw) dengan dan tanpa sektor basis perdagangan beserta persentase perubahannya

<b>Tahun</b>	<b>CVw Kawasan Subosukawonosraten</b>	<b>Cvw Tanpa Sektor Basis perdagangan</b>	<b>Persentase Perubahan(%)</b>
2017	0.37441743	0.338229228	9.6652%
2018	0.375457131	0.340039775	9.4331%
2019	0.381381848	0.346536716	9.1365%
2020	0.402990835	0.371395486	7.8402%

*Sumber: Data diolah, 2022*

Indeks Williamson tanpa sektor basis perdagangan mempunyai rerata sebesar 0.349050301 lebih rendah dibandingkan jika memasukkan sektor basis perdagangan yakni dengan rata-rata mencapai 0.383561811. Sektor basis perdagangan justru semakin mengakibatkan disparitas yang terjadi, dengan rata-rata persentase perubahan sebesar 9.0188% selama tahun 2017-2020.

**Tabel 8** Indeks Williamson (CVw) dengan dan tanpa sektor basis transportasi dan pergudangan beserta persentase perubahannya

<b>Tahun</b>	<b>CVw Kawasan Subosukawonosraten</b>	<b>Cvw Tanpa Sektor Basis transportasi dan pergudangan</b>	<b>Persentase Perubahan(%)</b>
2017	0.37441743	0.380995809	1.7266%
2018	0.375457131	0.382562583	1.8573%
2019	0.381381848	0.388443427	1.8179%
2020	0.402990835	0.411419063	2.0486%

*Sumber: Data diolah, 2022*

Dapat dilihat tabel diatas, sektor basis transportasi dan pergudangan justru mampu dalam mengurangi disparitas pendapatan yang terjadi di kawasan Subosukawonosraten yakni dengan rata-rata IW sebesar 0.383561811, jauh lebih rendah dibandingkan dengan dispritas pendapatan tanpa memasukkan PDRB sektor sektor transpotasi dan pergudangan dengan rata-rata mencapai 0.390855221.

**Tabel 9.** Indeks Williamson (CVw) dengan dan tanpa sektor basis penyedia akomodasi dan makan minum beserta persentase perubahannya

Tahun	CVw Kawasan Subosukawonosraten	Cvw Tanpa Sektor Basis akomodasi dan makan minum	Persentase Perubahan(%)
2017	0.37441743	0.365498969	2.3820%
2018	0.375457131	0.367211702	2.1961%
2019	0.381381848	0.373539965	2.0562%
2020	0.402990835	0.397909549	1.2609%

Sumber: Data diolah, 2022

Rata-rata IW tanpa sektor penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 0.376040046 lebih rendah jika dibanding dengan memasukkan sektor basis penyedia akomodasi dan makan minum yakni mencapai 0.383561811. Rata-rata persentase perubahan dari tahun ke tahun Indeks Williamson cenderung selalu menurun. Meskipun persentase perubahan dengan dan tanpa sektor basis penyedia akomodasi dan makan minum setiap tahun mengalami penurunan, akan tetapi sektor basis ini belum mampu mengurangi disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten.

**Tabel 10** Indeks Williamson (CVw) dengan dan tanpa sektor basis informasi dan komunikasi

Tahun	CVw Kawasan Subosukawonosraten	Cvw Tanpa Sektor Basis informasi dan komunikasi	Persentase Perubahan(%)
2017	0.37441743	0.323044676	13.7207%
2018	0.375457131	0.320869587	14.5390%
2019	0.381381848	0.324728757	14.8547%
2020	0.402990835	0.332217963	17.5619%

Sumber: Data diolah, 2022

Besarnya IW tanpa sektor basis informasi dan komunikasi sebesar 0.325215246 lebih rendah dibandingkan dengan memasukkan sektor basis informasi dan komunikasi yakni dengan rata-rata sebesar 0.383561811. Dengan persentase perubahan yang cenderung meningkat dari tahun ketahun, dengan rata-rata persentase perubahan sebesar 15.1691%. Ini berarti, sektor basis informasi dan komunikasi justru semakin mengakibatkan disparitas pendapatan di kawasan Subosukawonosraten

**Tabel 11** Indeks Williamson (CVw) dengan dan tanpa sektor basis jasa keuangan dan asuransi

Tahun	CVw Kawasan Subosukawonosraten	Cvw Tanpa Sektor Basis jasa keuangan dan asuransi	Persentase Perubahan(%)
2017	0.37441743	0.372366643	0.5477%
2018	0.375457131	0.373620394	0.4892%
2019	0.381381848	0.379521382	0.4878%
2020	0.402990835	0.400963915	0.5030%

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai Indeks Williamson dengan dan tanpa sektor basis jasa keuangan dan asuransi hanya terdapat selisih yang sedikit, akan tetapi sektor basis ini tetap menyebabkan disparitas pendapatan yang terjadi, dengan rata-rata IW tanpa sektor basis sebesar 0.381618084 lebih rendah dibandingkan dengan memasukkan sektor basis jasa keuangan dan asuransi dengan rata-rata mencapai 0.38356181.

**Tabel 12** Indeks Williamson (CVw) dengan dan tanpa sektor basis Basis real estate

Tahun	CVw Kawasan Subosukawonosraten	Cvw Tanpa Sektor Basis real estate	Persentase Perubahan(%)
2017	0.37441743	0.360473564	3.7241%
2018	0.375457131	0.362132671	3.5489%
2019	0.381381848	0.368604811	3.3502%
2020	0.402990835	0.389720806	3.2929%

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat indeks Williamson tanpa sektor basis real estate dengan rata-rata sebesar 0.370232963 lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai indeks Williamson dengan memasukkan sektor basis real estate dengan rata-rata tahun ke tahun mencapai 0.383561811. Tingkat persentase perubahan disparitas dengan dan tanpa sektor basis real estate searah menurun dari tahun ketahunnya, dari 3.7241% pada tahun 2017 menjadi 3.2929% pada tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan, namun sektor basis real estate tetap belum mampu dalam mengurangi disparitas di kawasan Subosuwonosraten.

**Tabel 13** Indeks Williamson (CVw) dengan dan tanpa sektor basis jasa perusahaan beserta persentase perubahannya

Tahun	CVw Kawasan Subosukawonosraten	Cvw Tanpa Sektor Basis jasa perusahaan	Persentase Perubahan(%)
2017	0.37441743	0.372742793	0.4473%
2018	0.375457131	0.373721594	0.4622%
2019	0.381381848	0.379615699	0.4631%
2020	0.402990835	0.401422901	0.3891%

Sumber: Data diolah, 2022

Rata-rata nilai indeks Williamson tanpa sektor basis jasa perusahaan sebesar 0.381875747 lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata indeks Williamson dengan memasukkan sektor basis jasa perusahaan yakni mencapai 0.383561811. meskipun persentase perubahan sangat kecil, akan tetapi sektor jasa perusahaan tetap saja tidak mampu menurunkan tingkat disparitas pendapatan di kawasan Subosukawonosraten.

**Tabel 14** Indeks Williamson (CVw) dengan dan tanpa sektor basis administrasi pemerintahan beserta persentase perubahannya

Tahun	CVw Kawasan Subosukawonosraten	Cvw Tanpa Sektor Basis administrasi pemerintahan	Persentase Perubahan(%)
2017	0.37441743	0.36083583	3.6274%
2018	0.375457131	0.362292165	3.5064%
2019	0.381381848	0.368456767	3.3890%
2020	0.402990835	0.390225496	3.1676%

Sumber: Data diolah, 2022

Disparitas pendapatan tanpa sektor basis administrasi pemerintahan mempunyai rata-rata dari tahun ke tahunnya sebesar 0.370452564 lebih rendah apabila jika dibandingkan dengan rata-rata indeks Williamson dengan memasukkan PDRB sektor basis administrasi pemerintahan yakni mencapai 0.383561811. Rata-rata persentase perubahan dengan dan tanpa sektor basis administrasi pemerintahan yakni mencapai 3.4226%, hal ini tidak mampu menjadikannya dalam mengurangi disparitas pendapatan

**Tabel 15** Indeks Williamson (CVw) dengan dan tanpa sektor basis jasa pendidikan

Tahun	CVw Kawasan Subosukawonosraten	Cvw Tanpa Sektor Basis jasa pendidikan	Persentase Perubahan(%)
2017	0.37441743	0.37964839	1.3778%
2018	0.375457131	0.381159084	1.4960%
2019	0.381381848	0.387341357	1.5386%
2020	0.402990835	0.40905698	1.4830%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson, sektor basis jasa pendidikan ini mampu dalam mengurangi disparitas pendapatan di kawasan Subosukawonosraten, karena sektor ini mampu menjadi andalan dalam perekonomian di hampir seluruh kabupaten dan kota di dalam kawasan Subosukawonosraten, yakni kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Tingkat disparitas pendapatan dengan memasukkan sektor basis jasa pendidikan menjadi lebih rendah yakni sebesar 0.383561811 dibandingkan tanpa memasukkan sektor basis jasa pendidikan yakni disparitas pendapatan mencapai 0.389301453.

**Tabel 16** Indeks Williamson (CVw) dengan dan tanpa sektor basis jasa kesehatan dan kegiatan sosial

Tahun	CVw Kawasan Subosukawonosraten	Cvw Tanpa Sektor Basis jasa kesehatan dan kegiatan sosial	Persentase Perubahan(%)
2017	0.37441743	0.374121633	0.0790%
2018	0.375457131	0.375166019	0.0775%
2019	0.381381848	0.381144708	0.0622%
2020	0.402990835	0.402518192	0.1173%

Sumber: Data diolah, 2022

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi sektor basis terakhir yang ada di dalam kawasan Subosukawonosraten, meskipun mampu menjadi sektor

basis, akan tetapi sektor ini tidak mampu dalam mengurangi disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten. Rata-rata disparitas pendapatan tanpa sektor basis jasa kesehatan sebesar 0.383237638 lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai rata-rata disparitas pendapatan dengan memasukkan PDRB sektor basis jasa kesehatan yakni mencapai 0.383561811. Jika dilihat persentase perubahan Indeks Williamson dengan dan tanpa sektor basis jasa kesehatan, cenderung menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi pada tahun 2020 naik kembali menjadi 0.1173%, ini dikarenakan kasus covid 19 melonjak pada tahun 2020.

Dari keduabelas sektor basis, seluruhnya tidak selalu mampu menurunkan tingkat disparitas pendapatan di kawasan Subosukawonosraten. Hal ini sejalan dengan Apriyani (2017) yang menyatakan bahwa sektor basis tidak selalu dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi, justru terdapat sektor basis yang mengakibatkan meningkatnya ketimpangan pendapatan, hal ini dikarenakan peningkatan perekonomian yang tinggi dari sektor basis tersebut hanya terdapat di daerah-daerah tertentu saja.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient, Kawasan Subosukawonosraten memiliki 12 sektor basis, yakni sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyedia akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan dan kegiatan sosial serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Hasil analisis Indeks Williamson, tingkat disparitas pendapatan dari tahun 2017 hingga 2020 selalu meningkat yakni dari 0,37441743 pada tahun 2017 menjadi 0,402990835 pada tahun 2020. Berdasarkan hasil Tipologi Klassen daerah menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 kota yang masuk dalam kategori maju tapi tertekan, terdapat 4 kabupaten yang masuk ke kategori berkembang cepat, sedangkan 2 kabupaten lainnya masuk kedalam kategori tertinggal.

Sektor basis yang mampu mengurangi disparitas pendapatan kawasan Subosukawonosraten hanya sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa pendidikan. Dimana sektor transportasi dan pergudangan yang memiliki peran paling besar dalam mengurangi disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten, yakni dengan rata-rata persentase perubahan sebesar 1.8626%.

### **Saran**

Perlunya kebijakan pemerintah dengan memprioritaskan pembangunan daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah pada kuadran II dan III dengan memberikan pembiayaan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelatihan serta peningkatan sarana pelayanan kesehatan dengan membuat program pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu.

Pemerintah daerah hendaknya semakin aktif dengan penguatan kelembagaan Badan Koordinasi Antar Daerah (BKAD) dengan terlaksananya kerjasama antar daerah di bidang tenaga kerja, pariwisata, perdagangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merangsang investasi baru melalui kebijakan daerah dengan mempermudah perijinan usaha. Dan perlunya pengembangan sektor ekonomi basis yang memiliki daya saing secara merata, melibatkan dan dirasakan seluruh elemen

masyarakat agar disparitas pendapatan yang terjadi tidak semakin meningkat. Dengan memberikan pelatihan berwiraswasta kepada para pelaku sektor potensial sehingga terciptanya lapangan pekerjaan baru serta menguatkan industri berbasis rakyat dengan pengembangan destinasi wisata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. (2021). Analisis disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015—2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1), 1.
- BPS. (2020). *Provinsi Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2020*, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
- BPS. (2021). *Kabupaten Boyolali dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Boyolali, 2021.
- BPS. (2021). *Kabupaten Karanganyar dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Karanganyar, 2021.
- BPS. (2021). *Kabupaten Klaten dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Klaten, 2021.
- BPS. (2021). *Kabupaten Sukoharjo dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Sukoharjo, 2021.
- BPS. (2021). *Kabupaten Surakarta dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Surakarta, 2021.
- BPS. (2021). *Kabupaten Sragen dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Sragen, 2021.
- BPS. (2021). *Kabupaten Wonogiri dalam Angka Tahun 2020*, BPS Kabupaten Wonogiri, 2021.
- Islami, Fitriah Sari dan Nugroho, SBM. (2018). Faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*. 33(1), 29-39.
- Iswanto, Denny.(2015).Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi, Signifikan* 4(1), 50.
- Lailatul & Lucky. (2021). *Analisis ketimpangan pembangunan daerah serta hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat di kawasan gerbang kertosusila Provinsi Jawa Timur*. Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya, 1-2.
- Octavia, Hana S. (2021). Analisis pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan (studi kasus pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 3-4.
- Purba, R. S. (2020). *Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia*, 44-45.
- Sari, Apriyani Intan. (2017). *Analisis peranan sektor ekonomi basis terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2015*. Bachelor's Thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional teori dan aplikasi*, Praninta offset: Padang
- Sjafrizal.(2014). *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*, edisi pertama cetakan pertama, Rajawali Pers: Jakarta
- Tarigan, Robinson. (2016). *Perencanaan pembangunan wilayah*. Bumi Aksara: Jakarta.